
Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kota Bengkulu

¹ Jarkoni ² Firza Bermanto ³ Ayun Intan Oktaria

STIE Bisnis Internasional Indonesia Bekasi

1. jarkoni@stiebii.ac.id
2. firzabermanto@stiebii.ac.id
3. ayuintanoktaria@stiebii.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by a thought that with the existence of tax sanctions and good service to the community, it will increase taxpayer compliance. This study aims to determine how much influence the application of transportation sanctions and motor vehicle tax payments services has on taxpayer compliance at the Bengkulu City Samsat office. In this study, researchers used quantitative descriptive methods, data collection techniques using questionnaires and documentation. The data analysis technique used multiple linear regression test. The results showed that the results of the t-test values (0.000 0.05) and (0.021 0.05), with an error rate of 5% while the f-test value showed a result of 21,529 and a probability of 0.000. And the results of the analysis of the correlation coefficient of 29.3%. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the application of tax sanctions and motor vehicle tax payment services has an effect on taxpayer compliance at the Bengkulu City Samsat Office.

Keywords: *Motorized Vehicle Tax, Taxpayer Compliance, Tax Sanctions.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa dengan adanya sanksi perpajakan dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Samsat Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif, teknik pengambilan datanya menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil nilai uji t ($0.000 \leq 0,05$) dan ($0,021 \leq 0,05$). dengan taraf kesalahan 5% sedangkan nilai uji f menunjukkan hasil sebesar 21.529 dan probabilitas sebesar 0,000. Serta hasil analisis koefisien korelasi sebesar 29,3%. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kota Bengkulu.

Kata Kunci : *Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu negara dapat membiayai pengeluarannya secara mandiri. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar pula kemampuan negara untuk membiayai pembangunan. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang dibebankan kepada rakyat untuk pemasukan kas negara dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi), (Mubarok, J. 2021). Adapun tujuannya untuk membayar atau membiayai pengeluaran umum. Pajak kendaraan bermotor, sebagai pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan pedesaan, dan perkotaan dll. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional.

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kepatuhan adalah sifat patuh atau ketaatan”. Dengan kata lain, kepatuhan merupakan suatu sifat patuh, taat, ataupun tunduk pada suatu ajaran dan aturan. Sedangkan definisi kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Ebta Setiawan, 2020:84). Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak ini dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan 125egara dan daerah, dimana dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih merujuk pada sikap wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara, bukan hanya sekadar takut akan sanksi perpajakan yang berlaku.

2. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (Hendro Subroto, 2017:193) terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal ini mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak. Sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara material sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

3. Pengetahuan Pajak

Berdasarkan penuturan Pancawati dan Nila bahwa pengetahuan pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Ayu Kade Restu Pebrianti Dewi, 2021: 278). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang

paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud baik lewat indra maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang- Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

4. Sanksi Perpajakan

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang- undang perpajakan. Sanksi pajak adalah hukuman negatife yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. (Resmi, 2018:71). Maka dari itu sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2016: 67).

Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang- undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhan atau ditaati. Menurut Mardiasmo bahwa, sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya, (Qisthi Yoeanda, Afifudin, A., & Mawardi, M. C, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengantujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan simpatik".Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatori

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, (Sugiyono, 2012: 80). Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki karakteristiknya. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat umum yang memiliki kendaraan roda dua yang berada di Kota Bengkulu. Populasi pada penelitian ini berjumlah 185.134 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber data untuk menyusun suatu penelitian menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012: 33) adalah sebagai berikut :

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tah dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden, selain itu kuesioner juga cocok untuk digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirm melalui pos, atau internet.

b. Observasi

Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dimaksud adalah untuk mendapatkan informasi data secara teoritis melalui buku buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh landasan dalam mengelolah data dan dapat menarik kesimpulan.

d. Riset Internet (*Online Research*)

Penulis berusaha untuk memperoleh berbagai data dan informasi tambahan dari situs- situs yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan observasi dengan mengamati gejala dan fakta mengenai unit analisis dalam penelitian ini sedangkan untuk kuesioner melibatkan tanggapan konsumen secara langsung mengenai variabel-variabel yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan dalam draft dan kuisisioner dibuat dengan menggunakan skala Likert yang jawabannya diberi skor untuk keperluan analisis data. Menurut Sugiyono (2016:68) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti

Uji Validitas Dan Reabilitas

Menurut sugiyono (2016:173) Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Syarat minimum instrument yang bisa dikatakan valid adalah jika $r \geq 0,30$. Jadi korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid.

Menurut sugiyono (2016:190) Reliabel ialah instrumen yang apabila terdapat kesamaan hasil penelitian dalam waktu yang berbeda. Pengujian Reliabilitas instrument dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik Belah Dua (*split half*) yaitu dengan mengelompokkan instrumen ganjil dan instrumen genap. Selanjutnya skor total kelompok ganjil dan kelompok genap dicari korelasinya. selanjutnya dianalisis dengan rumus *Spearman Brown* :

$$r_i = \frac{2 \cdot r}{1 + r}$$

Keterangan :

r_i = Realibilitas internal seluruh instrument

r = Korelasi *product moment* antara belahan ganjil dan genap

Teknik Analisis Data

Menurut Narkubo Cholid dan Achmadi Abu (2012:76) dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Dalam penelitian ini Data yang diperoleh akan digambarkan dalam bentuk persentase, agar terlihat seberapa besar Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kota Bengkulu. Kemudian data antar variabel akan dikorelasikan dengan menggunakan metode statistik guna mencari hubungan/pengaruh antar variabelnya.

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ayofian Siregar (2013:100) Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif .Analisis Deskripsi atau

penggambaran data dalam penelitian bertujuan untuk memberi gambaran pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor samsat kota bengkulu Untuk analisis deskriptif dalam penelitian dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu : data yang sudah terkumpul, kemudian masing-masing data diberi skor dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Dalam melakukan penarikan kesimpulan masing-masing pertanyaan disertai dengan 4 kemungkinan jawaban yang harus dipilih Dari jawaban tersebut diberi skor berdasarkan Skala Likert, kemudian disusun kriteria penilaian untuk setiap item pernyataan berdasarkan jumlah persentase skor jawaban yang diperoleh dibagi dengan skor ideal dan dikalikan 100%. Atau dapat dihitung dengan Rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P= Persentase perolehan

F= Nilai skor jawaban responden

N= Skor ideal (ditetapkan dengan asumsi bahwa setiap responden pada setiap pertanyaan memberi jawaban dengan skor tertinggi)

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 orang dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 4. Sedangkan skala pengukuran terkecil adalah 1, sehingga diperoleh :

a. Jumlah komulatif terbesar = $100 \times 4 = 400$
Presentase skor yang diperoleh adalah $\frac{400 \times 100}{400} = 100\%$

b. Jumlah komulatif terkecil = $100 \times 1 = 100$
Presentase skor yang diperoleh adalah $\frac{100 \times 100}{400} = 25\%$

Nilai rentangnya adalah $100\% - 25\% = 75\%$. Jika nilai rentang dibagi 4 skala pengukuran maka akan didapat nilai interval = $18,75\%$ yang diperoleh dari $75\% : 4$

Nilai rentangnya adalah $100\% - 25\% = 75\%$. Jika nilai rentang dibagi 4 skala pengukuran maka akan didapat nilai interval = $18,75\%$ yang diperoleh dari $75\% : 4$

Kriteria Penilaian

No	Persentase	Katagori
1	25,00% - 43,74%	Sangat tidak baik
2	43,75% - 62,49%	Tidak Baik
3	62,50% - 81,24%	Baik
4	81,25% - 100,00%	Sangat Baik

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2009 :215) Uji normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis regresi berganda, yaitu variabel-variabel independen dan dependen harus berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji statistik sederhana yang digunakan untuk menguji asumsi normalitas adalah dengan menggunakan uji normalitas dari Kolmogorov Smirnov. Metode pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel, jika lebih besar dari 0,05 pada taraf signifikansi alpha 5% (0,05), maka menunjukkan distribusi data normal

Uji Multikolinearitas

Menurut Arikunto (Suharsimi Arikunto, 2010) Uji Multikolinieritas dilakukan untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolinieritas adalah *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Apabila nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sugiyono (2002:361) Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *Variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji untuk mendeteksi adanya gejala ini dilakukan dengan uji Glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresikan absolute residual dengan variabel independen. Model dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas jika probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05)

Uji Hipotesis

Uji hipotesis berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yangdidapat signifikan. Didalam uji hipotesis mencakup analisis Regresi Linear berganda, uji f dan uji T dan koefisien determinasi yaitu untuk mengukur hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Variabel dependen dan variabel independen. Menurut Arikunto (Arikunto, 2010: 108) Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kota Bengkulu.

Analisis Regresi Linear Bergada

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
a	= Konstanta yang menunjukkan besar nilai Y jika X = 0
b1 - b3	= Koefisien regresi persial, yaitu kostanta yang menunjukkan besar peran X dalam menentukan Y.
X ₁	= Penerapan Sanksi Perpajakan
X ₂	= Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ :Penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kota Bengkulu.
- H₂ :Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kota Bengkulu.
- H₃ :Penerapan Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kota Bengkulu.

Uji Korelasi

Analisis Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur hubungan/pengaruh antar variabel yang didesain sebagai berikut:

X $\longrightarrow$ Y
 Keterangan : X = X₁ Penerapan Sanksi Perpajakan
 X₂ Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
 Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Mengukur kedekatan korelasi antar variabel digunakan koefisien korelasi disimbolkan “r” dengan kategori sebagai berikut

Koefisien Korelasi Nilai

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,119	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Rendah
0,60 – 0,799	Sedang
0,80 – 1,000	Kuat
	Sangat Kuat

Sumber : Metode Penelitian Bisnis Sugiyono

Uji variabel bebas terhadap variabel terkait digunakan uji korelasi yang menggunakan rumus korelasi *pearson product moment* yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot (\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n \cdot (\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{XY} = \text{Koefisien korelasi antar skor butir (X) dengan Skor butir (Y)}$$

n = jumlah sampel penelitian

ΣXY = jumlah hasil perkalian antara skor x dan y

ΣX = Jumlah Seluruh Skor X

ΣY = jumlah seluruh skor Y

Σ = Jumlah kuadrat skor variabel (X)

Σ = Jumlah kuadrat skor variabel (Y)

Σxy = Jumlah perkalian skor item dengan skor butir X dan skor Variabel Y.

Uji t (Uji Parsial)

Menurut sugiyono (2009:121) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan). Dimana $t_{tabel} > t_{hitung}$, H_0 diterima. Dan jika $t_{tabel} < t_{hitung}$, maka H_1 diterima, begitupun jika $sig > \alpha (0,05)$, maka H_0 ditolak H_1 diterima.

Uji f (Simultan)

Menurut Arikunto (Suharsimi Arikunto, 2010) Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikannya beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%); 0,05 (5%) dan 0,10 (10%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Hal yang dilakukan sebelum menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji sampel besar sebanyak 30 responden. Tingkat signifikansi 10% jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid. Sedangkan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid. Berikut ini adalah hasil uji validitas:

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas dari Item – Item Variabel Penelitian

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R table	Keterangan
Penerapan Sanksi Perpajakan	X1.1	0.737	0,194	Valid
	X1.2	0.763	0,194	Valid
	X1.3	0.784	0,194	Valid
	X1.4	0.782	0,194	Valid
	X1.5	0.769	0,194	Valid
	X1.6	0.776	0,194	Valid
	X1.7	0.819	0,194	Valid
	X1.8	0.735	0,194	Valid
Pelayanan Pembayaran Pajak Bermotor	X2.1	0.704	0,194	Valid
	X2.2	0.852	0,194	Valid
	X2.3	0.794	0,194	Valid
	X2.4	0.75	0,194	Valid
	X2.5	0.885	0,194	Valid
	X2.6	0.850	0,194	Valid
	X2.7	0.855	0,194	Valid
	X2.8	0.888	0,194	Valid
	X2.9	0.850	0,194	Valid
	Y1.1	0.845	0,194	Valid
	Y1.2	0.708	0,194	Valid
	Y1.3	0.674	0,194	Valid
	Y1.4	0.623	0,194	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.5	0.683	0,194	Valid
	Y1.6	0.755	0,194	Valid
	Y1.7	0.842	0,194	Valid
	Y1.8	0.819	0,194	Valid
	Y1.9	0.782	0,194	Valid
	Y1.10	0.863	0,194	Valid
	Y1.11	0.842	0,194	Valid
	Y1.12	0.762	0,194	Valid
	Y1.13	0.849	0,194	Valid
	Y1.14	0.867	0,194	Valid
	Y1.15	0.872	0,194	Valid
	Y1.16	0.870	0,194	Valid
	Y1.17	0.853	0,194	Valid
	Y1.18	0.819	0,194	Valid

Sumber :Hasil Olahan Data 2022

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji validitas dengan jumlah 30 responden dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan variabel yang diajukan untuk responden adalah valid karena dilihat dari nilai r hitung $>$ r tabel (0,194) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

Uji Reliabilitas

Hal yang dilakukan setelah menunjukkan bahwa semua variabel pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji sampel besar sebanyak 30 responden Pernyataan dapat di katakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,6. Berikut ini adalah hasil uji reliabel:

Hasil Uji Reliabilitas Item – Item Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Sanksi Pajak	0.902	Reliabel
Pelayanan Pembayaran Pajak Bermotor	0.943	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.966	Reliabel

Sumber : Olahan Data Penulis 2022

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji reliabilitas dari 100 responden dapat diketahui bahwa semua variabel dalam pernyataan dinyatakan reliabel karena telah memenuhi nilai yang disyaratkan yaitu dengan nilai Cronbach Alpha $>$ 0,6.

Statistik Deskriptif Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan (X_1)

Pengukuran responden terhadap variabel Penerapan Sanksi Perpajakan dalam penelitian ini tersebar pada 8 pertanyaan yang dapat dideskripsikan pada tabel berikut

Statistik Deskriptif Variabel X_1

No.	No Pernyataan	Frekuensi Jawaban				Jumlah	Indeks
		SS	S	N	STS		
	X1.1	18	51	27	4	283	2,83
	X1.2	29	55	15	1	312	3,12
	X1.3	25	51	11	2	299	2,99
	X1.4	26	56	18	0	308	3,08
	X1.5	21	46	32	1	319	3,19
	X1.6	23	55	20	2	322	3,22
	X1.7	25	48	27	0	298	2,98
	X1.8	22	59	19	0	303	3,03
Maximum							3,22
Minimum							2,83
Nilai Rata Rata Penerapan Sanksi Perpajakan							3,03

Sumber : Olahan Data Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 100 responden dalam memberikan tanggapan dan penilaian atas variabel penerapan sanksi perpajakan dengan nilai terbesar terdapat pada pernyataan ke-2 yaitu “Saya akan dikenakan sanksi perpajakan jika saya menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor” dengan angka terbesar 3,22 dan nilai terkecil terdapat pada pernyataan ke-5 yaitu “Penerapan sanksi perpajakan telah sesuai dengan peraturan perpajakan” dengan angka terkecil 2,83 sedangkan nilai rata rata Penerapan Sanksi Perpajakan sebesar 3,03 sehingga dapat diinterprestasikan termasuk dalam kategori baik.

Statistik Deskriptif Variabel Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (X_2)

Pengukuran responden terhadap variabel Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam penelitian ini tersebar pada 9 pertanyaan yang dapat dideskripsikan pada table berikut :

Statistik Deskriptif Variabel X_2

No	No Pernyataan	Frekuensi Jawaban				Jumlah	Indeks
		SS	S	N	STS		
1.	X1.1	18	51	27	4	283	2,83
2.	X1.2	19	55	15	1	312	3,12
3.	X1.3	25	51	11	2	299	2,99
4.	X1.4	26	56	18	0	308	3,08
5.	X1.5	21	46	32	1	319	3,19
6.	X1.6	23	55	20	2	322	3,22
7.	X1.7	25	48	27	0	298	2,98
8.	X1.8	22	59	19	0	303	3,03
Maximum							3,22
Minimum							2,83
Nilai Rata Rata Penerapan Sanksi Perpajakan							3,03

Sumber : Olahan Data Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 100 responden dalam memberikan tanggapan dan penilaian atas variabel Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai terbesar terdapat pada pernyataan ke-2 yaitu “Pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah samsat Kota Bengkulu mudah dijangkau” dengan angka terbesar 3,33” dan nilai terkecil terdapat pada pernyataan ke-5 yaitu “Petugas pelayanan pajak bersikap baik dan sopan” dengan angka terkecil 2,97 sedangkan nilai rata rata Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 3,14 sehingga dapat diinterpretasikan termasuk dalam kategori baik.

Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Pengukuran responden terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam penelitian ini tersebar pada 18 pertanyaan yang dapat dideskripsikan pada table berikut :

Statistik Deskriptif Variabel Y

No.	No Pernyataan	Frekuensi Jawaban				Jumlah	Indeks
		SS	S	N	STS		
1.	Y1	21	40	34	5	277	2,77
2.	Y2	14	66	20	0	294	2,94
3.	Y3	15	71	14	0	281	2,81
4.	Y4	11	78	11	0	318	3,18
5.	Y5	13	75	12	0	301	3,01
6.	Y6	14	48	35	3	270	2,70
7.	Y7	12	42	41	5	261	2,61
8.	Y8	7	42	44	7	249	2,49
9.	Y9	8	38	44	10	244	2,44
10.	Y10	14	45	36	5	268	2,68
11.	Y11	13	42	40	5	263	2,63
12.	Y12	7	43	43	7	228	2,28
13.	Y13	16	37	44	3	266	2,66
14.	Y14	16	41	40	3	270	2,70
15.	Y15	15	42	40	3	269	2,69
16.	Y16	12	41	42	5	260	2,60
17.	Y17	11	50	36	3	269	2,69
18.	Y18	13	39	43	5	260	2,60
Maximum							3,18
M Minimum							2,28
Nilai Rata Rata Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor							2,66

Sumber : Olahan Data Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 100 responden dalam memberikan tanggapan dan penilaian atas variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai terbesar terdapat pada pernyataan ke-12 yaitu “Saya selalu menghitung ulang jumlah pajak kendaraan bermotor yang akan saya bayarkan “dengan angka terbesar 3,18 dan nilai terkecil terdapat pada pernyataan ke-9 yaitu “Saya selalu menghitung pajak yang

terhutang dengan benar” dengan angka terkecil 2,28 sedangkan nilai rata rata Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 2,66 sehingga dapat diinterpretasikan termasuk dalam kategori baik.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian persyaratan digunakan sebagai persyaratan dalam penggunaan model analisis regresi linear. Suatu model regresi harus memenuhi syarat – syarat bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolineritas dan heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian asumsi klasik :

Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini menggunakan kolmogorov smirnov. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9.
Uji Normalitas

Variabel	Sig	batas	Keterangan
Penerapan Sanksi Perpajakan	0.542	>0,05	Normal
Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	0.221	>0,05	Normal
Kepatuhan Wajib Pajak	0.150	>0,05	Normal

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui nilai *asympt.sig* dari variabel Penerapan Sanksi Perpajakan 0,542 > 0,05, variabel Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 0,221 > 0,05, dan Kepatuhan Wajib Pajak 0,150 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (disturbance) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residuals satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan Uji Gletser.

Syarat dilakukannya uji ini yaitu apabila nilai signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	sig	batas	Keterangan
Penerapan Sanksi Perpajakan	0.072	>0,05	Tidak terjadi heterokedastitas
Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	0.093	>0,05	Tidak terjadi heterokedastitas

Sumber: hasil olah data 2022

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas pada variabel Penerapan Sanksi Perpajakan 0,072 > 0,05, dan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 0.093

> 0,05 dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* (α).

Tabel 4.11
Uji Multikolineartias

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Penerapan Sanksi Perpajakan	0.791	1.264	Tidak terjadi multikolinieritas
Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	0.791	1.264	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: hasil olah data 2022

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* dari variabel Penerapan Sanksi Perpajakan $0,791 > 0,10$ atau nilai VIF $1.264 < 10$ dan pada variabel Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor $0,791 > 0,10$ atau nilai VIF $1,296 < 10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam model analisis regresi linier berganda akan diuji secara simultan (Uji f) maupun secara parsial (Uji t). Ketentuan uji signifikansi uji f dan uji t adalah sebagai berikut:

Menerima H_a : jika probabilitas (p) $\leq 0,05$ artinya variable independent secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependent.

4.4.1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Beta	T Tabel	T Hitung	Sig T
Konstanta	13.079		19830	0.234	0.021
Penerapan Sanksi Perpajakan (X1)	0.977	0.415		4.372	0.000
Pelayanan Pembayaran Pajak Bermotor (X2)	0.432	0.224		2.354	0.021
F hitung : 21.529					
Sig F : 0.000					
Adjusted R Square : 0.293					

Berdasarkan tabel 4.12 diatas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21.0 *for windows* didapat hasil sebagai Berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 13.079 mengidentifikasikan bahwa jika variable independent yaitu Penerapan Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Pembayaran Pajak Bermotor adalah nol maka minat wajib pajak menggunakan e-filling adalah sebesar konstanta yaitu 13.079.
2. Nilai koefisien untuk Penerapan Sanksi Perpajakan (X1) adalah 0.977 mengidentifikasikan bahwa setiap Penerapan Sanksi Perpajakan akan mengakibatkan adanya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0.977 dengan asumsi variabel lain konsta.
3. Nilai koefisien untuk Pelayanan Pembayaran Pajak Bermotor (X2) adalah 0.432 mengidentifikasi bahwa setiap peningkatan Pelayanan Pembayaran Pajak Bermotor akan mengakibatkan adanya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 0,202 dengan asumsi variable lain konsta.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4.13
Hasil Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardize dCoefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.079	5.580		2.344	0.021
	X1	0.977	0.223	0.415	4.372	0.000
	X2	0.432	0.184	0.224	2.354	.021

Sumber: Data Statistik Olahan Spss 2022

Hasil Uji t Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan (X₁)

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dikatakan bahwa Penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Kota Bengkulu karena :

1. Hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$: $4.372 > 1.9830$
2. Nilai $\text{sig } t > \alpha (0.05)$: $0.000 < 0.05$

Hasil Uji t Variabel Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (X₂)

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dikatakan bahwa Penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Kota Bengkulu karena :

1. Hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$: $2.354 > 1.9830$
2. Nilai $\text{sig } t > \alpha (0.05)$: $0.021 < 0.05$

Hasil uji Simultan (Uji f)

Uji parsial f dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan (X1) dan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Samsat Kota Bengkulu (Y).

Tabel 4.14 Hasil Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3239.320	2	1619.660	21.529	0.000 ^b
	Residual	7297.430	97	75.231		
	Total	10536.750	99			

Sumber: Data Statistik Olahan Spss 2022

Dari hasil uji f pada tabel 4.14 diperoleh f hitung sebesar 21.529 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena $\text{sig } 0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Pembayaran Pajak Bermotor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4.15 Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.554 ^a	.307	.293	8.674

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Pembayaran Pajak Bermotor, Penerapan Sanksi Perpajakan

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) = 0,293, artinya variabel Penerapan Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Pembayaran Pajak Bermotor secara bersama-sama mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 29,3% sisanya sebesar 70,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Hasil Uji Korelasi

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Untuk membuktikan apakah koefisien korelasi antar variabel tersebut signifikan atau tidak, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan (X₁) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.16 Hasil Uji Korelasi Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Penerapan Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak
Penerapan Sanksi Perpajakan	Pearson Correlation	1	.518**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.518**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Sumber: Data Statistik Olahan Spss 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Sig 0,000 < 0,05 maka secara signifikan terdapat hubungan antara variabel (X_1) Penerapan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.17 Hasil Uji Korelasi Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations			
		Pelayanan Pembayaran Pajak Bermotor	Kepatuhan Wajib Pajak
Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Pearson Correlation	1	.413**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.413**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Sumber: Data Statistik Olahan Spss 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Sig 0,000 < 0,05 maka secara signifikan terdapat hubungan antara variabel (X_2) Pelayanan Pembayaran Pajak Bermotor dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengujian dan pembahasan yang telah disajikan dalam penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kota Bengkulu, dengan nilai probabilitas sebesar $0.000 \leq 0,05$.
2. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Samsat Kota Bengkulu dengan nilai probabilitas sebesar $0,021 \leq 0,05$.
3. Penerapan sanksi perpajakan dan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Samsat Kota Bengkulu dengan koefisien determinasi (*Adjusted R²*) = 0,293, artinya Penerapan Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Pembayaran Pajak Bermotor mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 29,3% .

2. Saran

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan peneliti dalam melakukan penelitian, saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah

1. Bagi Wajib Pajak
Saran kepada wajib pajak agar lebih peduli kepada Negara dengan cara menjadi wajib pajak yang patuh terhadap peraturan dan pembayaran pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor..
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bengkulu
Saran Kantor Pelayanan Pajak Kota Bengkulu, petugas pajak yang memberikan informasi pajak harus lebih ditingkatkan lagi, petugas pajak juga bisa memberikan informasi melalui media sosial untuk pemasangan spanduk, billboard ataupun browser dengan memberikan informasi yang mudah dipahami.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Saran untuk peneliti selanjutnya, berdasarkan hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 29,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain maka kedepannya yang perlu dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah menggunakan teknik pengampilan sampel dengan margin eror sebesar 5% dan memasukan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2010). Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN..
- Fikriningrum, W.K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak
- Hutagaol, John. 2017. Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu
- Jarkoni, J., & Hotmasari, R. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kawasan MM2100. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(2), 58-68. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v1i2.23>.
- Mardiasmo.2016.Perpajakan. Yogyakarta : Edisi Revisi. Penerbit Cv Andi Offset.

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan-Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: ANDI.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suandy, 2017. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono dan Susanto, Agus. 2015. Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia: Edisi 3. Jakarta : PT. Indeks.
- Sumarsan, Thomas. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Jakarta: Indeks, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 (UU KUP) pasal 1 ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Penerimaan Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Yusril, Yusril; Hardiana, Candra Dwi & Suparyati. 2022. The Effect of Sales Growth, Profitability, Leverage and Liquidity on Financial Distress Conditions at Transportation Sub-Sector Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). *Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(2), 194-207.
<https://doi.org/10.56457/jimk.v10i2.289>.
- Zulaikha, Puspa Arum 2012. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus wilayah KPP Pratama Cilacap). *Jurnal Akuntansi*, Volume 1, Nomor, Tahun 2012, Halaman 1-8.